

# **OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH**



# **OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH**

**Editor:**

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2017

## **Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah /Mandala Harefa; Sony Hendra Permana; Dewi Restu Mangeswuri; Hilma Meilani; Editor: Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.—Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xii + 122 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-581-6

Judul:  
Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah  
Mandala Harefa; Sony Hendra Permana; Dewi Restu Mangeswuri;  
Hilma Meilani

*Copyrights* © 2017  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Cetakan pertama: Desember 2017  
YOI: 1471.36.25.2018  
Desain sampul: Rahmatika

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230  
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114  
Faksimile: +62 (0)21-31924488  
Email: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
Website: [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

## KATA PENGANTAR

Saat ini sudah hampir 20 tahun sejak lahirnya era otonomi di Indonesia yang diikuti dengan desentralisasi fiskal. Hadirnya buku berjudul *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* ini sangat tepat. Saya menilai buku ini menarik, mengingat kemandirian fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya terjadi. Baru sebagian kecil daerah saja yang telah mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya dan berkontribusi besar bagi pembentukan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Sementara sebagian besar lainnya masih sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari bagaimana kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan. Selain itu juga diperlukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya diungkap juga bahwa saat ini secara rata-rata nasional pajak daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah belum mampu memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan PAD. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kompetensi aparatur di daerah dalam memungut pajak menjadi permasalahan yang sering kali ditemui. Alur selanjutnya dalam buku ini adalah bagaimana penerimaan daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi harus dikelola secara baik. Pengelolaan keuangan daerah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pengawasan

## *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*

terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas berbagai permasalahan dalam penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi kebijakan dalam penerimaan daerahnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan PAD dan mampu membiayai pembangunan daerah sendiri.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan perumusan strategi dan kebijakan dalam hal penerimaan daerah. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam merancang tema, *outline* KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya kemandirian fiskal di seluruh daerah otonomi di Indonesia. Amin.

Jakarta, September 2017  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian DPR RI  
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
<b>Prolog</b>	<b>1</b>
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
<b>KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM UPAYA KEMANDIRIAN ANGGARAN</b>	
<i>Mandala Harefa</i>	3
A. Pendahuluan	3
B. Kondisi Pendapatan Daerah	6
C. Penerimaan Daerah dan Permasalahannya	11
D. Penerimaan Daerah dalam Tataran Konsep Otonomi	12
E. Kemampuan Keuangan Daerah	16
F. Tantangan dalam Peningkatan Penerimaan Daerah	23
G. Penutup	27
Daftar Pustaka	31
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
<b>PROBLEMATIKA DAN UPAYA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH</b>	
<i>Sony Hendra Permana</i>	33
A. Pendahuluan	33
B. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pajak Daerah	38
C. Peranan Pajak Daerah Bagi Pembangunan dan Permasalahannya	45
D. Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah	49
E. Penutup	53
Daftar Pustaka	54

## **BAGIAN KETIGA**

### **PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**

<i>Dewi Restu Mangeswuri</i>	57
A. Pendahuluan	57
B. Implementasi Proses Pengelolaan Keuangan Daerah	59
C. Identifikasi Sumber Pendapatan Daerah	65
D. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	68
E. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	71
F. Sistem Informasi Keuangan Daerah	74
G. Penutup	75
Daftar Pustaka	78

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BUKITTINGGI**

<i>Hilma Meilani</i>	81
A. Pendahuluan	81
B. Keuangan Daerah dan Pajak Daerah	84
C. Kondisi Umum Keuangan Daerah Kota Bukittinggi	92
D. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	99
E. Penutup	104
Daftar Pustaka	106

<b>EPILOG</b>	108
---------------	-----

<b>INDEKS</b>	113
---------------	-----

<b>BIOGRAFI EDITOR DAN PENULIS</b>	117
------------------------------------	-----



# DAFTAR TABEL

## BAGIAN PERTAMA

<b>Tabel 1.</b> Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016	21
---	----

## BAGIAN KEDUA

<b>Tabel 1.</b> Pajak Daerah Berdasarkan Kewenangannya dan Sistem Pemungutannya	44
---	----

## BAGIAN KEEMPAT

<b>Tabel 1.</b> Perbandingan Tarif Tertinggi Jenis Pajak dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009	89
<b>Tabel 2.</b> Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	91
<b>Tabel 3.</b> Interpretasi Kriteria Kontribusi	92
<b>Tabel 4.</b> Target PAD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011-2015	94
<b>Tabel 5.</b> Realisasi PAD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011-2015	95
<b>Tabel 6.</b> Perkembangan Target Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)	96

<b>Tabel 7.</b> Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)	97
<b>Tabel 8.</b> Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015	99
<b>Tabel 9.</b> Efektivitas Pajak Daerah Kota Bukittinggi Per Jenis Pajak Tahun 2011-2015 (%)	101
<b>Tabel 10.</b> Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015	103

# DAFTAR GAMBAR

## BAGIAN PERTAMA

- Gambar 1.** Komposisi Pendapatan Provinsi Tahun Anggaran 2016 8
- Gambar 2.** Komposisi Pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota, 2016 9
- Gambar 3.** Kemandirian Keuangan Daerah Kab./Kota 2016 20

## BAGIAN KEDUA

- Gambar 1.** Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional Tahun 2008-2015 37
- Gambar 2.** Tren Pajak Daerah Secara Nasional 50

## BAGIAN KETIGA

- Gambar 1.** Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah 60



## PROLOG

Buku dengan judul *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalan sumber pendanaan yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Kemandirian anggaran dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga diperlukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan sumber-sumber penerimaan oleh aparatur daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah secara rata-rata nasional belum mampu memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan pendapatan asli daerah. Berbagai permasalahan masih dialami pemerintah daerah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan rendahnya kompetensi dan komposisi aparatur di daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah perlu dilakukan secara bersamaan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan harus

## *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*

secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pemerintah daerah yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut juga dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya DPRD, agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dalam rangka mengukur optimalisasi penerimaan daerah, maka perlu dilihat besar kecilnya kontribusi penerimaan daerah tersebut dalam pembentukan PAD. Salah satu contoh yang dikemukakan dalam buku ini adalah kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi pada periode tahun 2011-2015, di mana diperoleh hasil kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih sangat kecil, yakni di bawah 50%. Untuk itu, pemerintah daerah, khususnya Kota Bukittinggi perlu meningkatkan kemampuan keuangan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi, serta mendorong pertumbuhan investasi daerah agar kegiatan ekonomi daerah terus bertumbuh.

Adanya pemahaman yang komprehensif tentang penerimaan daerah, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan kebijakan penerimaan daerah yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangannya sehingga mampu membiayai pembangunan daerah sendiri.

Jakarta, September 2017

Editor

## EPILOG

Buku dengan judul *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* mencakup dua dimensi utama yaitu: (a) faktor kelembagaan; dan (b) potensi ekonomi daerah. Mandala Harefa menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahan Jokowi-JK sangat berkeinginan agar pemerintah Indonesia berupaya menarik investasi dari berbagai negara. Pada periode pemerintah 2015-2019 dalam perencanaan pembangunan bahwa kebutuhan investasi diperlukan guna mendukung pembiayaan infrastruktur. Hal ini dibutuhkan guna terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja. Dengan memperbesar investasi padat pekerja, lapangan kerja baru akan semakin terbuka di mana hal ini menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Untuk itu diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan yang rendah di beberapa daerah. Dalam mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Namun demikian perlu usaha luar baik pemerintah pusat dan daerah, mengingat daya saing dalam menarik investasi di antara negara-negara ASEAN semakin ketat. Pemerintah telah memutuskan beberapa perubahan yang mendasar dalam peraturan, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Peraturan Presiden dan lain-

lain. Namun demikian sejak berlakunya otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah. Keadaan baru sangat diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menarik investasi selain permasalahan-permasalahan klasik yang dihadapi selama ini.

Faktor kelembagaan menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Peran kepala daerah dalam mempengaruhi daya tarik investasi menjadi pembahasan yang dilakukan oleh Sony Hendra Permana. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, kepala daerah dimungkinkan untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun dalam kenyataannya, justru banyak daerah yang menetapkan berbagai aturan yang menghambat investasi. Hal ini tercermin dari 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah pusat di mana mayoritas aturan-aturan tersebut terkait investasi. Kepala daerah seharusnya mampu mempromosikan daerahnya, memiliki kemampuan manajemen organisasi yang baik, dan membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah dalam berinvestasi tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu aspek kelembagaan, institusi perizinan dibentuk untuk memberikan layanan perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dewi Mangeswuri mencermati peran dari institusi perizinan adalah sangat penting, karena institusi ini membuat regulasi dan memiliki kewenangan penuh berkaitan perizinan. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan investasi adalah aturan yang berbelit dan



## *Epilog*

tumpang tindih sehingga menyulitkan bagi investor. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menjelaskan fungsi institusi perijinan ini dan bagaimana untuk lebih menyederhanakan aturan. Metode penulisan yang dilakukan adalah analisis deskriptif berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi. Yang dapat disimpulkan adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan dan pelayanan investasi, pemerintah telah memiliki konsep pelayanan satu pintu atau yang lebih dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mana semua jenis pengajuan perizinan dilakukan di satu area. Selain itu, pemerintah sebagai regulator juga berperan dalam memberikan pelayanan dan proses perizinan yang cepat dan tanggap. Adapun strategi untuk meningkatkan investasi yaitu dengan membuat regulasi untuk menyederhanakan sistem perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, institusi ini harus terus melakukan koordinasi lintas sektoral bahkan mungkin lebih ditingkatkan secara intensif, sehingga para investor merasa aman dan nyaman dalam menginvestasikan modalnya.

Pada dimensi kedua dalam buku ini, Hilma Meilani mencoba mengungkapkan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, khususnya di kota Bukittinggi. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya pemerintahan mengoptimalkan sumber keuangan daerah secara mandiri dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pembaharuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan provinsi diberikan kewenangan terhadap 5 jenis pajak sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan terhadap 11 jenis pajak. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah realisasi penerimaan pajak daerah masih belum efektif dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah,

### *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*

dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum signifikan untuk menyokong APBD secara keseluruhan. Analisis efektivitas pajak daerah Kota Bukittinggi dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi merupakan suatu objek penelitian yang menarik karena kota Bukittinggi masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat padahal Bukittinggi memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, sehingga perlu untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah agar dapat meningkatkan PAD dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Jakarta, 30 September 2016

Editor

# INDEKS

## A

- alokasi, 4, 63
  - fungsi, 63
- anggaran, 1, 4, 16, 17, 23, 27, 29, 57
  - kemadiran, 1, 3, 25, 28
  - penyusunan, 63
- aparatus, 25, 29
  - kreativitas, 29
- Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBD), 4, 6, 10, 11, 16, 17, 24, 61, 64, 76

## B

- Bukittinggi, 19, 22, 48, 84, 92, 100, 101, 104, 105
  - pajak daerah, 90, 101
  - penerimaan pajak, 98

## D

- daerah, 1, 3, 4
  - ekstensifikasi pajak, 51
  - intensifikasi pajak, 50
  - investasi, 2
  - kekayaan, 60, 63, 65, 70, 82, 86, 95
  - kemandirian, 11, 13, 17, 18, 24, 58, 82
  - kepala, 48, 49, 57, 59, 75,

## 110

- keuangan, 5, 9, 11, 13, 16, 57, 62, 69, 71, 75, 84
- otonomi, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 24, 27, 33, 52, 57, 58, 64, 71, 76, 83, 110
- pajak, 1, 2, 15, 21, 33, 35, 37, 41, 42, 45, 49, 65, 82, 83, 86, 87, 95 103, 105
- pemerintah, 5, 8, 12, 16, 17, 23, 29, 34, 45, 48, 65, 68, 81, 98
- penerimaan, 1, 2, 11, 12, 23, 26, 38, 84
- retribusi, 15, 25, 34, 65, 67, 83
- desentralisasi, 3, 15, 42, 65, 82
  - fiskal, 3, 4, 9, 12, 27, 33
  - kebijakan, 4, 5
- distribusi, 37, 83
  - fungsi, 63

## E

- efektivitas, 11, 24, 64, 83, 90, 99, 101
- ekonomi, 22, 28, 33, 40, 45, 52
- ekstensifikasi, 23, 26, 38, 49, 53, 100, 104

*Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*

**F**

fiskal, 3, 10, 28, 36  
desentralisasi, 3, 4, 9, 12, 27,  
33

**G**

Green tax, 51

**H**

hubungan situasional, 14, 15

**I**

insentif, 26, 43  
intensifikasi, 25, 38, 50, 53, 100,  
102, 104

**K**

kabupaten, 9, 16, 22  
Kabupaten/Kota, 4, 18, 43, 57, 66,  
67, 83, 111  
kebijakan, 3, 6, 11, 17, 28, 36, 41,  
52, 63, 72  
otonomi, 10, 28  
Kenneth Blanchard, 14  
keuangan, 2, 4, 12, 18, 27, 34, 58  
daerah, 5, 6, 9, 11, 16, 62, 68,  
83, 84  
pengelolaan, 2, 58, 59, 61, 71  
sistem informasi, 74  
kewenangan, 4, 5, 16, 25, 27, 42,  
52, 57, 60  
kontribusi, 2, 17, 41, 76, 82, 87, 90  
Kota, 9, 16, 24

**L**

laporan keuangan, 69, 75

**O**

optimalisasi, 25, 49  
otorisasi, fungsi, 63

**P**

pajak, 34, 38  
jenis, 34, 35, 43, 44, 66, 83,  
87, 93  
daerah, 1, 2, 15, 21, 33, 35,  
37, 41, 42, 45, 49, 65, 82,  
83, 86, 87, 95, 103, 105  
peraturan, 47  
Paul Hersey, 14  
Pajak Bumi Bangunan (PBB), 25  
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 5,  
6, 11, 16, 19, 24, 35, 65, 81, 86,  
94, 102  
pembangunan, 6, 9, 10, 17, 27, 30,  
33, 38, 45, 58, 62, 64, 76  
pembiayaan, 13, 27, 29, 38, 42, 62,  
102  
pemerintah daerah, 5, 8, 12, 14,  
16, 23, 29, 34, 37, 50, 52, 60,  
69, 81, 83  
pemerintah pusat, 4, 9, 14, 15, 26,  
35, 41, 47, 71, 74, 109  
pemungutan, 13, 23, 26, 41, 42, 47,  
49, 51, 87, 93  
penerimaan, 4, 11, 16, 22, 24, 29,  
35, 40, 52  
pengawasan, 36, 53, 58, 71, 73  
fungsi, 63  
perencanaan  
fungsi, 63  
perimbangan, 5, 24, 28, 45, 75, 103  
pertanggungjawaban, 57, 58, 68

**R**

realisasi, 14, 21, 45, 98, 111  
retribusi, 15, 17, 28, 46, 65, 67, 83,

*Indeks*

88  
Retribusi Daerah, 15, 19, 25, 29,  
34, 45, 65, 67, 82, 93

**S**

SDM, 22, 45, 48, 102  
sistem informasi, 74  
stabilisasi, 43  
fungsi, 63

**T**

target, 24, 63, 90, 94, 103

tarif pajak, 48, 51, 66, 89, 93  
transfer, 5, 18, 22, 28, 34, 36, 53,  
82  
transparansi, 68, 74

**U**

UPT, 25  
UU PDRD, 35, 43, 52, 88

**W**

wajib pajak, 22, 42, 87, 102



## BIOGRAFI EDITOR DAN PENULIS

### BIOGRAFI EDITOR

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.** adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE)* dari *Australian National University, Canberra, Australia* pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland, St. Lucia, Brisbane-Australia* pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputi Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM)*, serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST)*.



Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang

ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank (ADB)*, *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific (UN-ESCAP)*, *International Labour Organization (ILO)*, UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science*, *International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah [cmfirdausy@gmail.com](mailto:cmfirdausy@gmail.com) dan [carunia\\_firdausy@yahoo.com](mailto:carunia_firdausy@yahoo.com).

## BIOGRAFI PENULIS

**MANDALA HAREFA.** Penulis adalah adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 1995, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas



Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisis kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang dan mempersiapkan makalah bagi Ketua dan Anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang topiknya berkaitan dengan permasalahan ekonomi publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain keuangan Negara dan Daerah, ekonomi Regional dan topik lainnya terkait dengan ekonomi publik BUMN dan UMKM yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR dan Balai Pustaka. Alamat e-mail yang dapat dihubungi: mandnias@yahoo.com.

**SONY HENDRA PERMANA.** Penulis adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia”, “Peran Kepala Daerah Dalam Memengaruhi Daya Tarik Investasi di Indonesia”, dan “Peningkatan Peran Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Produk UMKM di Indonesia”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony\_hendra@yahoo.com.

**DEWI RESTU MANGESWURI.** Penulis lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta jurusan Akuntansi. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Kandidat Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan

Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini adalah Peneliti dengan pangkat/golongan Penata Muda (Golongan III/c) di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pernah ditugaskan sebagai Tim Pemantauan Pelaksanaan UU di DPR RI untuk memantau UU tentang Perindustrian dan UU tentang Undian, serta bersama dengan Tim Pengawasan Internal dan BURT menyusun draft Mekanisme Pengawasan di DPR RI. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Jurnal, 2016), Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha (Buku Tim, 2015), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Banjar dan Kota Denpasar) (Buku Tim, 2014), Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam (Jurnal, 2012). Tugas terkait penyusunan undang-undang adalah tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Saat ini masih menyelesaikan Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulis dapat dihubungi di: [mangeswuri@yahoo.com](mailto:mangeswuri@yahoo.com).

**HILMA MEILANI.** Penulis adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Kudus, 8 Mei 1977. Pendidikan S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 Finance di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2009 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Rasio Efektivitas dan Kontribusi PAD terhadap Belanja dan Investasi Daerah (2016), Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi AEC (2015), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah (2014), dan Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (2013). Penulis juga terlibat dalam penelitian

### *Biografi Editor dan Penulis*

kelompok di antaranya dengan topik: Pajak Daerah (2016), Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Menarik Investasi (2015), Kebijakan Persaingan Usaha (2014), dan Efektivitas Dana Perimbangan (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: [hilma.meilani@dpr.go.id](mailto:hilma.meilani@dpr.go.id).

